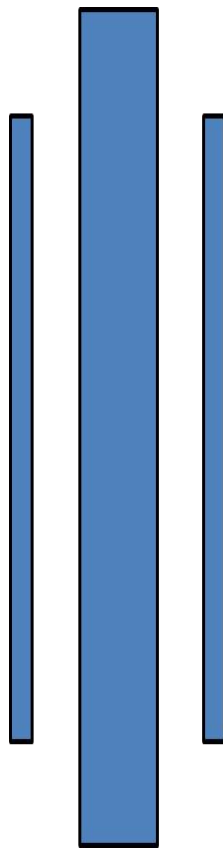




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya maka dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah sebagai acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun ke depan, serta memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan. Selain itu, memberikan acuan demi terwujudnya kegiatan tahun 2025-2029 yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Kebumen.

Hal-hal penting yang dimuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 secara garis besar meliputi hal-hal antara lain: Pendahuluan; Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Kebumen; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup serta Lampiran.

Kami menyadari atas kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 ini sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan. Akhirnya atas bantuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis diucapkan terima kasih.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT KEBUMEN

KARYANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680201 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 4

 1.3. Maksud Dan Tujuan 8

 1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13

 2.2. Kelompok Sasaran Layanan 39

 2.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 41

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51

 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 51

 3.2. Strategi Perangkat Daerah..... 54

 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 55

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56

 4.1 Uraian Program Dan Kegiatan 56

 4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif..... 68

 4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 83

 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah..... 87

 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (Ikk) 88

BAB V PENUTUP..... 89

 5.1 Pedoman Transisi..... 89

 5.2 Kaidah Pelaksanaan 89

LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2024 11

Tabel 2. 2 Indeks Desa (ID) Kecamatan Kebumen Tahun 2025 12

Tabel 2. 3 Kondisi Pegawai Kecamatan Kebumen Tahun 2025..... 23

Tabel 2. 4 Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Jenis Kelamin Tahun
2025 23

Tabel 2. 5 Komposisi SDM Kecamatan Kebumen 2025 Menurut Jabatan ... 24

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun
2025 24

Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Golongan Tahun 2025.. 26

Tabel 2. 8 Aset Tanah Kecamatan Kebumen 27

Tabel 2. 9 Gedung dan Bangunan Kecamatan Kebumen..... 27

Tabel 2. 10 Sarana Prasarana Kecamatan Kebumen 28

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Tahun 2021-
2026 34

Tabel 2. 12 *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen
Tahun 2020-2025 34

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025... 37

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kebumen 42

Tabel 2. 15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 50

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat
Daerah 53

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah..... 54

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 55

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebumen
..... 57

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah 59

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah 62

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..... 68

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 83

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 87

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 88

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen 4

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Kebumen 22

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Kebumen 10

Gambar 3. 1 Konsep Rentsra Kecamatan Kebumen 51

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
PD 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Kebumen wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan

program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2024-2044. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kebumen dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional, Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

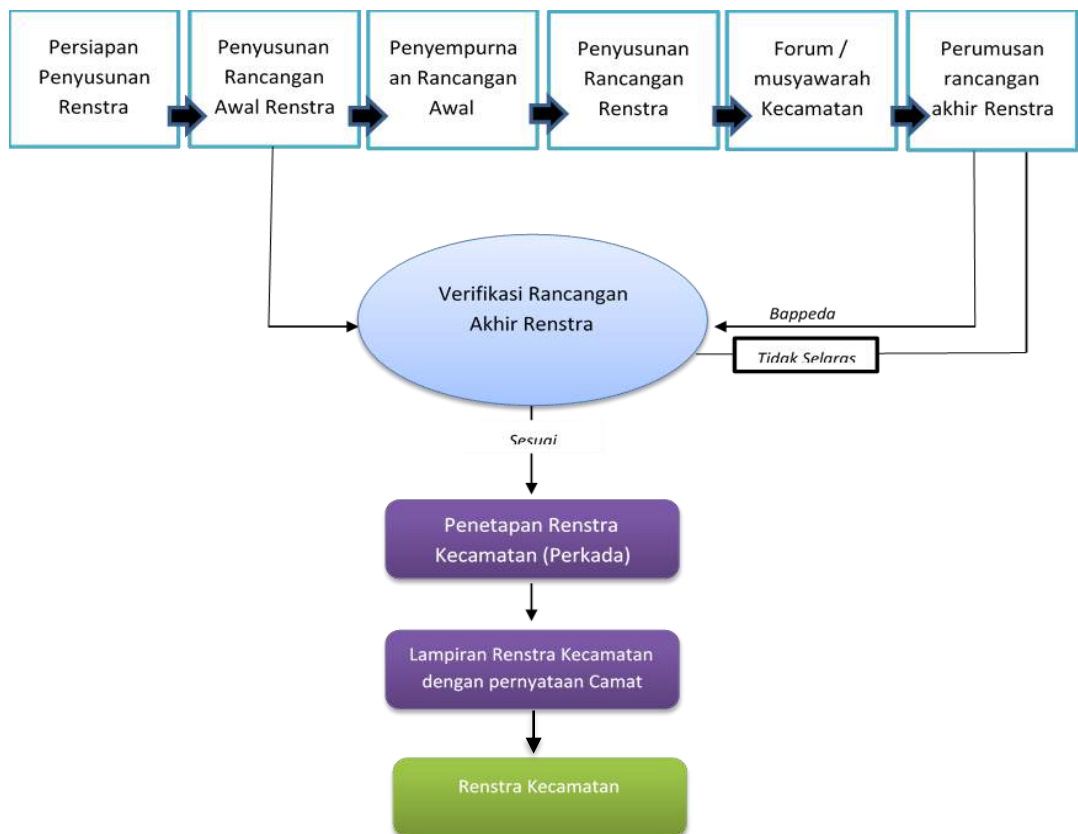
1. Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044;

3. Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Kebumen.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir renstra hingga penetapan renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana gambar berikut:



Bagan 1. 1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen

Berdasarkan uraian di atas, maka perlunya Kecamatan Kebumen menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kebumen;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra; landasan hukum penyusunan Renstra; maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari subbab gambaran pelayanan Kecamatan Kebumen yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kebumen; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kebumen; kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Kecamatan Kebumen; serta subbab permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kebumen yang memuat permasalahan pelayanan Kecamatan Kebumen dan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 serta strategi dan kebijakan Kecamatan Kebumen.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kebumen; target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

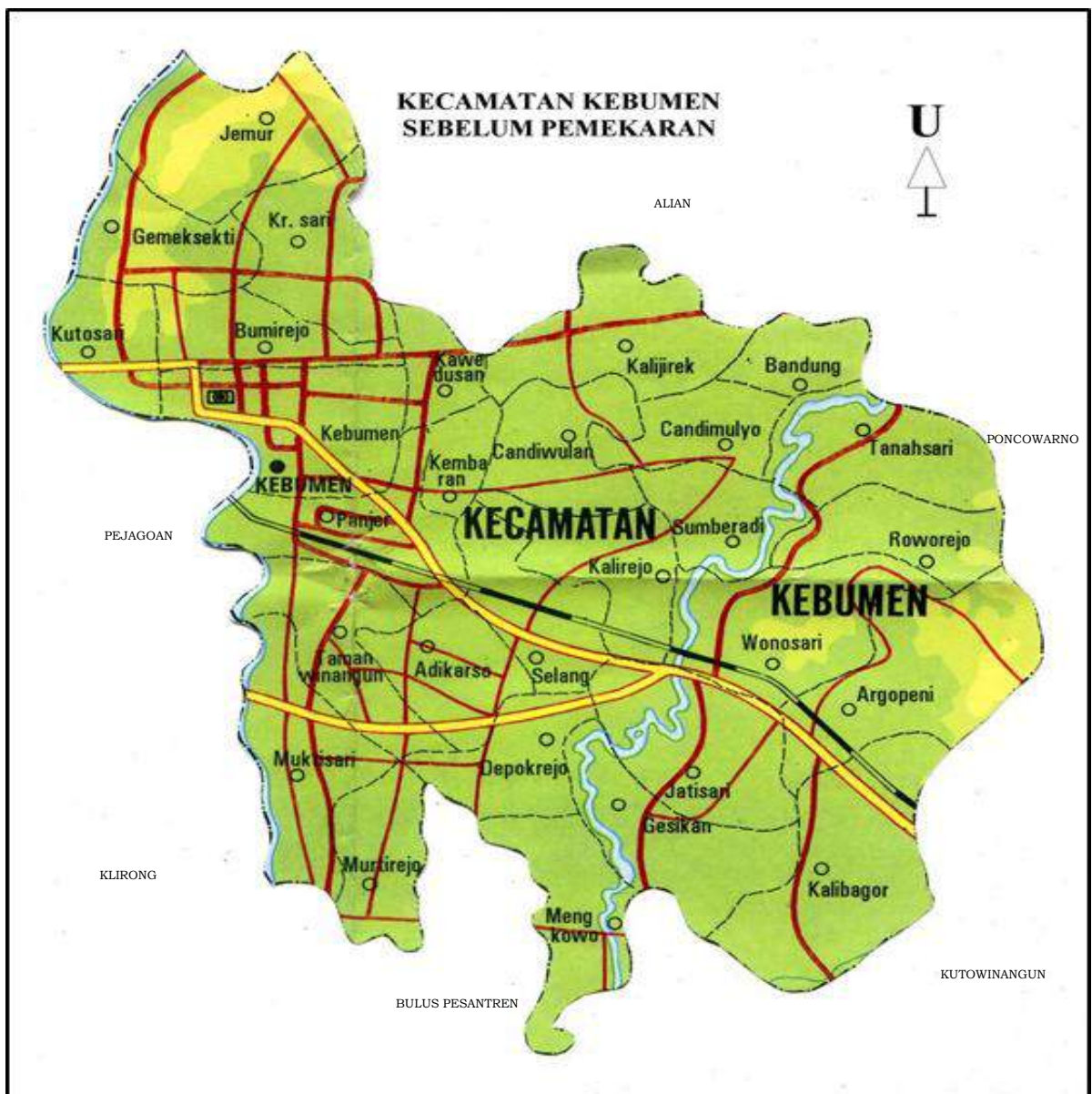
Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kebumen merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' lintang selatan dan 109°35'-109°3' bujur timur. Dengan luas 4.376 hektar atau 43,76 km² yang berada ditinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Poncowarno
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren



Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kecamatan Kebumen

Gambaran penduduk di Kecamatan Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2024

NO	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Muktisari	2.743	2.540	5.283
2.	Murtirejo	1.722	1.629	3.351
3.	Depokrejo	1.984	1.872	3.856
4.	Mengkowo	1.124	1.087	2.211
5.	Gesikan	1.385	1.328	2.713
6.	Kalibagor	2.269	2.301	4.570
7.	Argopeni	1.670	1.689	3.359
8.	Jatisari	3.462	3.277	6.739
9.	Kalirejo	2.371	2.222	4.593
10.	Selang	2.187	2.126	4.313
11.	Adikarso	2.172	2.061	4.233
12.	Tamanwinangun	5.128	5.015	10.143
13.	Panjer	5.394	5.385	10.779
14.	Kembaran	1.113	1.039	2.152
15.	Sumberadi	1.388	1.374	2.762
16.	Wonosari	2.862	2.872	5.734
17.	Roworejo	1.590	1.547	3.137
18.	Tanahsari	1.969	1.873	3.842
19.	Bandung	1.991	1.854	3.845
20.	Candimulyo	1.136	1.069	2.205
21.	Kalijirek	1.135	1.077	2.212
22.	Candiwulan	1.485	1.438	2.923
23.	Kawedusan	1.364	1.252	2.616
24.	Kebumen	3.667	3.785	7.452
25.	Kutosari	3.052	3.222	6.274
26.	Bumirejo	4.213	4.312	8.525
27.	Gemeksekti	3.738	3.497	7.235
28.	Karangsari	3.387	3.348	6.735
29.	Jemur	1.755	1.745	3.500
JUMLAH TOTAL		69.456	67.836	137.292

Sumber: KDA Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Kebumen memiliki penduduk sebanyak 137.292 jiwa terdiri dari laki laki 69.456 jiwa (50,6%) dan perempuan sebanyak 67.836 jiwa (49,4%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kebumen tahun 2024/2025 sebanyak 61 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 55 SD Negeri dan 6 SD Swasta dengan jumlah 9.736 siswa, 12 Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri dari 2 MI Negeri dan 10 MI Swasta dengan jumlah 3.055 siswa. Jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdiri dari 7 SMP Negeri dan 12 SMP Swasta, 2 MTs Negeri dan 6 MTs Swasta dengan jumlah 10.872 siswa. Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 6 SMA dan 5 MA dengan jumlah siswa 5.108 siswa. Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 18 sekolah dengan jumlah siswa 12.893 siswa. Serta jenjang pendidikan tinggi terdapat 1 Perguruan Tinggi swasta.

Di wilayah Kecamatan Kebumen tersedia berbagai fasilitas kesehatan, antara lain 1 rumah sakit pemerintah di Desa Muktisari, 2 rumah sakit swasta di Kelurahan Panjer dan Kelurahan Kebumen, serta 4 poliklinik yang berada di Kelurahan Panjer (2 unit), Kelurahan Kebumen (1 unit), dan Kelurahan Bumirejo (1 unit). Kecamatan Kebumen juga memiliki 3 Puskesmas yang berada di Desa Jatisari, Kelurahan Panjer, dan Desa Kutosari, serta 5 Puskesmas Pembantu (pustu) yang berlokasi di Kelurahan Selang, Kelurahan Tamanwinangun, Desa Tanahsari, Desa Kalijirek, dan Desa Karangsari. Selain itu, terdapat 151 Posyandu sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat, serta 21 apotik yang turut menunjang kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, Kecamatan Kebumen didukung oleh sarana perdagangan dengan adanya 8 desa/kelurahan yang memiliki kelompok pertokoan, 5 desa/kelurahan yang memiliki pasar dengan bangunan permanen, 1 desa/kelurahan yang memiliki pasar dengan bangunan semi permanen, 2 desa/kelurahan yang memiliki pasar tanpa bangunan, 21 desa/kelurahan yang memiliki minimarket/swalayan/ supermarket dan 11 desa/kelurahan yang memiliki restoran/rumah makan serta lembaga keuangan bank, baik Bank Umum Pemerintah maupun Bank Umum Swasta.

Tabel 2. 2
Indeks Desa (ID) Kecamatan Kebumen Tahun 2025

NO	NAMA DESA	STATUS INDEKS DESA		
		STATUS DESA	SKOR	TOTAL SCOR
1	Muktisari	Mandiri	80,31	510
2	Murtirejo	Maju	70,71	449
3	Depokrejo	Maju	73,70	468
4	Mengkowo	Mandiri	81,42	517
5	Gesikan	Maju	75,91	482
6	Kalibagor	Maju	77,64	493
7	Argopeni	Maju	75,28	478
8	Jatisari	Maju	77,80	494
9	Kalirejo	Mandiri	80,31	510

NO	NAMA DESA	STATUS INDEKS DESA		
		STATUS DESA	SKOR	TOTAL SCOR
10	Adikarso	Maju	73,54	467
11	Kembaran	Mandiri	86,77	551
12	Sumberadi	Maju	71,50	454
13	Wonosari	Mandiri	82,83	526
14	Roworejo	Maju	79,21	503
15	Tanahsari	Mandiri	80,31	510
16	Bandung	Mandiri	79,84	507
17	Candimulyo	Maju	77,95	495
18	Kalijirek	Mandiri	80,63	512
19	Candiwulan	Maju	75,91	482
20	Kawedusan	Mandiri	80,00	508
21	Kutosari	Mandiri	82,20	522
22	Gemeksekti	Mandiri	81,57	518
23	Karangsari	Mandiri	80,00	508
24	Jemur	Mandiri	80,63	512

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Indeks Desa (ID) adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks Desa terdiri atas komponen layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan Desa. Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Indeks Desa (ID) Kecamatan Kebumen Tahun 2025 dari 24 (dua puluh empat) desa terdiri dari 13 (tiga belas) desa dengan status mandiri dan 11 (sebelas) desa dengan status maju.

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kebumen dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di

tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;

- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

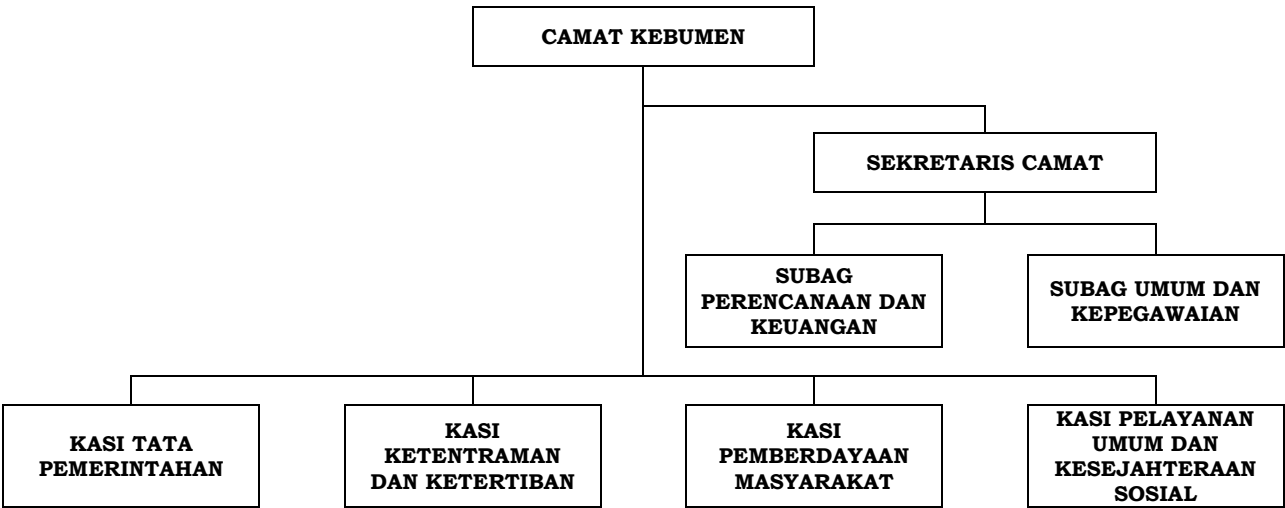
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Kebumen

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Sumber daya aparatur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 83 orang. Namun, sampai dengan akhir Oktober 2025 Kecamatan Kebumen memiliki jumlah pegawai sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kondisi Pegawai Kecamatan Kebumen Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	20	22	27	28	29
Perempuan	18	19	19	19	19
Jumlah ASN	38	41	46	47	48

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Sumber daya aparatur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen diklasifikasikan ke dalam beberapa kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	3	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	2	3
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2	1	3
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3	-	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	2
9	Lurah	3	-	3
10	Sekretaris Lurah	4	1	5
11	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	-	2
12	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	2	4
13	Seksi Pemerintahan dan Trantib	3	2	5
14	Staf	5	6	11
Jumlah		29	19	48
Persentase		60,4%	39,6%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah pegawai di Kecamatan Kebumen sebanyak 48 orang, terdiri dari 29 pegawai laki-laki (60,4%) dan 19 pegawai perempuan (39,6%). Secara keseluruhan, komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Kebumen.

Tabel 2. 5
Komposisi SDM Kecamatan Kebumen 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III/a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV/a	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV/a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV/a	1
9	Lurah	IV/a	3
10	Sekretaris Lurah	IV/b	5
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	2
12	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV/b	4
13	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	IV/b	5
14	Staf	-	21

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan komposisi jabatan di Kecamatan Kebumen, terdapat 1 jabatan eselon III/a (Camat) dan 1 jabatan eselon III/b (Sekretaris Kecamatan). Untuk eselon IV/a terdapat 7 orang, terdiri dari empat Kepala Seksi di tingkat kecamatan serta tiga Lurah. Sementara itu, eselon IV/b berjumlah 18 orang, mencakup Kepala Subbag, Sekretaris Lurah, serta Kepala Seksi di tingkat kelurahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa formasi struktural yang belum terisi mengingat Kecamatan Kebumen membawahi lima kelurahan.

Tabel 2. 6
Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	-	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	2	-	-	-	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	1	-	-	2
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	-	1	-	-	3
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	2	-	1	-	-	3

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	1	-	-	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	-	1	-	-	2
9	Lurah	3	-	-	-	-	-	3
10	Sekretaris Lurah	-	5	-	-	-	-	5
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	-	2
12	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	2	1	1	-	-	4
13	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	1	3	-	1	-	-	5
14	Staf	-	3	1	7	-	-	11
Jumlah		7	23	4	14	-	-	48
Persentase		15%	48%	8%	29%	-	-	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Kecamatan Kebumen dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang terdiri dari 18 orang ASN di Kecamatan Kebumen, 7 orang di Kelurahan Kebumen, 5 orang di Kelurahan Selang, 6 orang di Kelurahan Tamanwinangun, 5 orang di Kelurahan Panjer, dan 7 orang di Kelurahan Bumirejo dengan tingkat pendidikan yaitu 15% pendidikan S2, 48% pendidikan sarjana (S1), 8% pendidikan Diploma III, dan 29% pendidikan SLTA. Berdasarkan hasil analisis, latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Kebumen belum sepenuhnya memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, sehingga Kecamatan Kebumen terus melakukan peningkatan kompetensi dan penataan penempatan pegawai sesuai bidang.

Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Kebumen belum memadai karena beberapa jabatan struktural belum terisi, serta tidak semua Kepala Seksi dan Kepala Subbag memiliki staf pendukung. Keterbatasan staf di kecamatan dan kelurahan sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan, apalagi untuk Kecamatan Kebumen yang memiliki 24 desa dan 5 kelurahan. Pemenuhan sumber daya manusia baik, baik dari segi jumlah maupun kualitas, masih perlu ditingkatkan mengingat beban tugas yang cukup besar serta banyaknya fungsi perangkat daerah kabupaten yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Tabel 2. 7
Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol V/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	2	-	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	2	-	2
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	1	1	3
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	1	2	-	3
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	-	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1	-	2
9	Lurah	-	-	3	-	3
10	Sekretaris Lurah	-	-	5	-	5
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
12	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	4	-	4
13	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	-	-	5	-	5
14	Staf	5	2	4	-	11
Jumlah		7	6	32	3	48
Persentase		14%	13%	67%	6%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Kompisisi pegawai berdasarkan tingkat golongan terdiri dari golongan IV sebesar 6%, golongan III sebesar 67%, golongan II sebesar 13% dan golongan V/IX sebesar 14%. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah Kecamatan, maka sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

B. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Berikut sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2. 8
Aset Tanah Kecamatan Kebumen

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	876	1950	Kec. Kebumen	-	-	63	Bangunan Kantor	Pembelian	345.144.000	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1349	1981	Kec. Kebumen	-	-	46	Bangunan Kantor	Pembelian	724.413.000	Baik

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan data tersebut, terdapat dua bidang tanah yang digunakan untuk bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Kebumen, masing-masing seluas 876 m² dan 1.349 m². Keduanya berada di wilayah Kecamatan Kebumen, dan saat ini berada dalam kondisi baik serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung operasional kantor.

Tabel 2. 9
Gedung dan Bangunan Kecamatan Kebumen

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	-	Kec. Kebumen	-	-	Pembelian	667.030.000	
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	-	Kec. Kebumen	-	-	Pembelian	224.459.025	
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	-	Kec. Kebumen	-	-	Pembelian	521.599.100	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	-	Kec. Kebumen	-	-	Pembelian	658.121.800	
5	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	B	-	Kec. Kebumen	-	-	Pembelian	267.601.700	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan data tersebut, terdapat lima aset bangunan yang seluruhnya berada dalam kondisi baik dan berlokasi di Kecamatan Kebumen. Aset tersebut meliputi gedung kantor permanen, gedung kantor lainnya, gedung tempat ibadah, gedung pertemuan permanen, serta rumah negara golongan I tipe A. Seluruh bangunan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan layanan serta operasional pemerintahan.

Tabel 2. 10
Sarana Prasarana Kecamatan Kebumen

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	0	0	0	1	1
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	0	0	0	1	1
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0	0	0	1	1
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	0	0	0	1	1
5	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	1	0	0	0	1	1
6	Portable Generating Set	1	1	0	0	0	1	1
7	Mobil dinas	1	1	0	0	0	1	1
8	Sepeda Motor	33	33	0	0	0	33	33
9	Lemari Penyimpan	1	1	0	0	0	1	1
10	Lemari Besi/Metal	1	1	0	0	0	1	1
11	Lemari Kayu	3	3	0	0	0	3	3
12	Rak Besi	1	1	0	0	0	1	1
13	Filing Cabinet Besi	5	5	0	0	0	5	5
14	Buffet	1	1	0	0	0	1	1
15	Lemari Kaca	1	1	0	0	2	1	3
16	LCD Projector/Infocus	2	2	0	0	0	2	2
17	Mesin antrian	1	1	0	0	0	1	1
18	Running text	1	1	0	0	0	1	1
19	Kursi Besi/Metal	1	1	0	0	0	1	1
20	Meja Rapat	1	1	0	0	0	1	1
21	Meja Panjang	4	4	0	0	0	4	4
22	Meja 1/2 Biro	9	9	0	0	0	9	9
23	Kursi Rapat	70	70	0	0	40	70	110
24	Kursi Tamu	1	1	0	0	0	1	1
25	Kursi Putar	2	2	0	0	0	2	2
26	Kursi Biasa	20	20	0	0	0	20	20
27	Meubeleur lainnya	2	2	0	0	0	2	2
28	AC	5	5	0	0	0	5	5
29	Kipas Angin	5	5	0	0	0	5	5
30	Televisi	3	3	0	0	0	3	3
31	Sound System	2	2	0	0	0	2	2
32	Dispenser	1	1	0	0	0	1	1

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
33	Gucci	1	1	0	0	0	1	1
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	6	0	0	0	6	6
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	3	0	0	0	3	3
37	kursi kantor	2	2	0	0	0	2	2
38	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1	0	0	0	1	1
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon IV	2	2	0	0	4	2	6
40	Audio Amplifier	1	1	0	0	0	1	1
41	Microphone/Wireless MIC	1	1	0	0	0	1	1
42	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1	0	0	0	1	1
43	Meja Kerja	6	6	0	0	0	6	6
44	P.C Unit	2	2	0	0	0	2	2
45	Laptop	7	7	3	0	3	7	10
46	Note Book	1	1	0	0	0	1	1
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	0	0	0	1	1
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	4	0	0	2	4	6
49	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1	0	0	0	1	1
50	Papan Pengumuman	1	1	0	0	0	1	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan data Barang Milik Daerah (BMD) Kecamatan Kebumen tahun 2025, saat ini sarana dan prasarana tercatat dalam kondisi baik yang mencakup bangunan kantor, kendaraan dinas, meubelair, peralatan elektronik, serta berbagai perlengkapan pendukung pelayanan. Beberapa jenis barang memerlukan pemeliharaan rutin, sedangkan kebutuhan penambahan terutama terdapat pada kursi rapat, laptop, dan printer guna mendukung kelancaran pelayanan. Secara keseluruhan, pengelolaan BMD di Kecamatan Kebumen telah berjalan baik dan aset digunakan secara optimal untuk menunjang pelayanan pemerintah Kecamatan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kebumen secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa laptop, dan printer masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah personel yang ada, karena sebagian perangkat mengalami kendala seperti kinerja lambat atau kerusakan sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang Laktasi, WC, Dapur, Ruang Arsip, dan Pendopo Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Untuk atap bangunan kantor memerlukan renovasi dan diperlukan ruang arsip khusus dokumen kependudukan untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan dokumen secara lebih optimal.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebumen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kebumen dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Kebumen setiap tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kebumen setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kebumen setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kebumen setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga

anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kebumen dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;

- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kebumen
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Penyelenggaraan PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan dapat dilakukan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap aspek-aspek pelayanan seperti prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kesesuaian biaya/tarif, kompetensi dan sikap petugas, kualitas sarana dan prasarana, dan kepastian hasil pelayanan. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan capaian kinerja pelayanan publik Kecamatan Kebumen selama periode tahun 2021 hingga 2026. Data yang ada menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan dari tahun ke tahun, dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta realisasi capaian yang diperoleh.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Nilai	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	101,84	105,65	107,33	106,33	105,70	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	90	90,05	91	91,7	92	92,3	89,24	89,93	93,89	94,6	97,12	-	99,15%	99,98%	103,17%	103,16%	105,66	-	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Tabel 2. 12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	-	90	90,05	91	91,7	92	-	89,24	89,93	93,89	94,6	97,12	-	99,15%	99,86%	103,17%	102,82%	105,56%
Program Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan	-	-	89,25	90,3	90,72	91,06	-	-	87,23	93,64	93,22	92,2	-	-	97,7%	103,7%	102,8%	101,3%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	-	12,5	12,5	20,83	25	33,33	-	12,5	33,33	83,33	100	100	-	100	160	400	400	300

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Kinerja pelayanan publik Kecamatan Kebumen mengalami peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat serta persentase capaian yang melampaui target yaitu di atas 100%. Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebumen yang relatif optimal bahkan telah melampaui target renstra menggambarkan keberhasilan aparatur kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga ke depan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Kebumen dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kebumen dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kebumen pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kebumen berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kebumen, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan tren yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui tren tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi tren yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kebumen berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebumen, menggunakan analisis dari *output* yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Kebumen.

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan kecamatan merupakan cerminan kemampuan kecamatan dalam mengelola serta memanfaatkan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya. Secara umum, kinerja keuangan diukur melalui perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi penggunaannya, baik dari aspek tingkat penyerapan anggaran (proporsi dana yang terealisasi) maupun tingkat pencapaian hasil program (manfaat atau *output* yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut). Kinerja keuangan yang optimal tercermin melalui tingginya persentase realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan, pertumbuhan anggaran yang stabil dari tahun ke tahun, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh penggunaan sumber daya keuangan secara tepat sasaran, transparan, dan efisien.

Tabel 2. 13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.474.594.000	4.465.702.923	81,57	5.854.227.000	5.508.578.389	94,10	5.902.840.000	5.686.487.841	96,33	7.041.019.000	6.840.943.557	97,16	7.038.881.700	6.097.864.286	86,63	6,75%	9,01%
	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.635.000	9.388.800	97,44	29.000.000	28.733.800	99,08	34.423.000	34.175.800	99,28	28.786.000	28.118.300	97,68	29.670.000	29.020.000	97,81	51,60%	52,62%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.303.618.000	4.306.650.099	81,2	5.311.313.000	4.981.550.269	93,79	5.294.325.000	5.093.763.223	96,21	6.060.249.000	5.903.086.749	97,41	6.247.189.000	5.350.429.655	85,65	4,34%	6,11%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.360.000	48.859.300	98,99	172.320.000	172.032.000	99,83	138.213.000	136.213.000	98,55	228.490.000	217.272.900	95,09	157.547.700	148.704.150	94,39	65,90%	64,81%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.500.000	100	10.000.000	9.961.800	99,62	73.105.000	71.160.000	97,34	211.557.000	200.863.800	94,95	157.742.000	153.049.999	97,03	219,20%	213,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.531.000	50.647.224	86,53	166.434.000	155.857.370	93,65	176.997.000	168.505.597	95,20	251.667.000	239.484.908	95,16	230.943.000	210.461.283	91,13	56,16%	61,46%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.950.000	44.657.500	93,13	165.160.000	160.443.150	97,14	185.777.000	182.670.221	98,33	260.270.000	252.116.900	96,87	215.790.000	206.199.199	95,56	69,98%	73,23%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.710.000	70.500.000	99,7	86.872.000	86.486.000	99,56	83.719.000	83.718.600	100,00	1.479.024.500	1.446.473.660	97,80	51.081.000	50.895.400	99,64	397,33%	387,69%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.710.000	70.500.000	99,7	86.872.000	86.486.000	99,56	83.719.000	83.718.600	100,00	1.479.024.500	1.446.473.660	97,80	51.081.000	50.895.400	99,64	397,33%	387,69%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.424.220.000	3.328.662.524	97,21	3.874.285.000	3.614.545.300	93,30	3.929.394.000	3.902.465.700	99,31	4.655.145.200	4.586.639.525	98,53	4.986.394.872	4.730.686.317	94,87	10,04%	9,31%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.424.220.000	3.328.662.524	97,21	3.874.285.000	3.614.545.300	93,30	3.929.394.000	3.902.465.700	99,31	4.655.145.200	4.586.639.525	98,53	4.986.394.872	4.730.686.317	94,87	10,04%	9,31%
4	Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	33.691.000	30.622.300	90,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.691.000	30.622.300	90,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.848.000	4.817.000	99,36	5.000.000	4.477.300	89,55	5.000.000	5.000.000	100,00	26.323.000	26.265.800	99,78	19.061.000	19.035.000	99,86	100,50%	100,60%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.848.000	4.817.000	99,36	5.000.000	4.477.300	89,55	5.000.000	5.000.000	100,00	26.323.000	26.265.800	99,78	19.061.000	19.035.000	99,86	100,50%	100,60%
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.290.000	145.101.800	99,19	151.000.000	147.654.700	97,78	255.703.000	254.961.600	99,71	128.754.000	127.827.000	99,28	128.142.000	127.965.400	99,86	5,61%	6,17%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.290.000	145.101.800	99,19	151.000.000	147.654.700	97,78	255.703.000	254.961.600	99,71	128.754.000	127.827.000	99,28	128.142.000	127.965.400	99,86	5,61%	6,17%
Jumlah		9.154.353.000	8.045.406.547	87,88	9.971.384.000	9.361.741.689	93,89	10.171.656.000	9.927.633.741	97,60	13.330.265.700	13.028.149.542	97,73	12.223.560.572	11.026.446.403	90,21	8,42%	9,57%

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen, 2025

Keterangan: *) Angka Perkiraan

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen tahun 2021–2025, secara umum seluruh program menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik, dengan sebagian besar program mencapai realisasi di atas 90% setiap tahunnya. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjukkan capaian kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai 81,57% karena terdapat sisa anggaran gaji yang cukup besar. Hal ini terjadi karena banyaknya kekosongan pegawai sehingga belanja pegawai tidak terserap sepenuhnya.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki rata-rata realisasi anggaran tahun 2021-2025 mencapai 95%. Pertumbuhan anggaran menunjukkan tren meningkat signifikan karena adanya tambahan anggaran Kuota Kecamatan. Meskipun terjadi peningkatan anggaran yang besar, realisasi pada tahun 2024 mencapai 97,8 sehingga menunjukkan capaian kinerja yang baik.

Selanjutnya, program lain seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tetap menunjukkan capaian di atas 95% pada sebagian besar periode. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 8,42%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 9,57%, mencerminkan kinerja keuangan Kecamatan Kebumen pada periode 2021-2025 menunjukkan hasil yang cukup baik.

2.2. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kecamatan Kebumen sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana di kewilayahan memiliki beragam kelompok sasaran layanan yang perlu dianalisis agar kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran.

1. Masyarakat Umum

Kelompok terbesar adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan dasar administrasi kependudukan, perizinan dan non-perizinan, serta layanan informasi publik. Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Kebumen terus meningkat dengan dominasi usia produktif (15-64 tahun) sehingga kebutuhan akan layanan administrasi dan akses informasi semakin tinggi.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Terdapat 24 (dua puluh empat) desa dan 5 (lima) kelurahan di Kecamatan Kebumen yang menjadi mitra kerja utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Desa membutuhkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

3. Kelompok Perempuan dan Anak

Layanan bagi kelompok perempuan dan anak semakin relevan seiring program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4. Kelompok Pemuda

Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, teknologi informasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Kecamatan Kebumen perlu mendorong penguatan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa maupun kecamatan.

5. Kelompok Rentan

Analisis sosial menunjukkan masih terdapat kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan lain-lain yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan kecamatan diarahkan untuk memastikan kelompok ini memperoleh akses yang adil terhadap program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis.

6. Pelaku Ekonomi Lokal

Kecamatan Kebumen memiliki potensi wisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelompok sasaran ini membutuhkan fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Selain kelompok sasaran layanan tersebut, dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kebumen juga menjalin koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer 01, dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pelayanan kecamatan. Belum optimalnya pelayanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas kinerja aparatur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya yaitu pertama, kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ditunjukkan dengan belum optimalnya pola kerja aparatur, terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), serta masih kurangnya jumlah SDM yang tersedia. Kedua, rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang terlihat dari kesadaran administrasi masyarakat yang masih rendah sehingga banyak warga belum memperbarui data kependudukan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. Ketiga, masih minimnya sarana pendukung pelayanan. Hal ini terlihat dari belum tersedianya ruang arsip untuk administrasi kependudukan serta sarana dan prasarana kantor yang belum memadai dalam menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan publik.

Tabel 2. 14
Pemetaaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kebumen

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
				Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai

Sumber: Kecamatan Kebumen, 2025

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari

sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Kebumen masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Kebumen. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Kebumen memiliki terminal penumpang Tipe A dan Tipe C yaitu Terminal Kebumen, serta stasiun kereta api yaitu Stasiun Kebumen.

Renstra Kecamatan Kebumen diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Kebumen memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Kebumen, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir dan kekeringan terutama terjadi di wilayah dengan terbatasnya area resapan air serta drainase yang belum memadai sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan.
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di Kawasan padat penduduk dan area pasar berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan potensi terjadinya banjir.
3. Banyaknya kawasan perumahan menjadi salah satu faktor yang membuka peluang ekonomi baru.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Kebumen meliputi:

1. Peningkatan sistem drainase dan pengelolaan air serta penerapan konsep *green infrastructure* seperti taman resapan air.
2. Penguatan kelembagaan bank sampah dan pelaksanaan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) secara berkelanjutan.

3. Pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan UMKM di sekitar kawasan permukiman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi Bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

“KEBUMEN BERDAYA:

Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya”

- **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
- **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan,

sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

- **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Untuk pencapaian visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, Pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi

pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3. **MISI 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
4. **MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyup, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya

dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Kebumen mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelayanan publik. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam proses pelayanan administrasi di kecamatan. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab pemerintah atas kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi ditunjukkan dengan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Sementara itu, profesionalisme menuntut aparatur memiliki kompetensi, integritas, serta etos kerja tinggi dalam memberikan pelayanan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan ramah. Berikut adalah peranan Kecamatan Kebumen yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyup, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong, dan guyup rukun masyarakat diantaranya menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni dan budaya, serta mendorong kegiatan budaya desa seperti merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian cagar budaya.

2. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui *merit system* menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau *reward* ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

3. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian. Agenda kegiatan yang akan dilakukan meliputi penguatan ekonomi Desa, penguatan tata Kelola Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebumen. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen.

2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, serta isu lingkungan hidup strategis yang relevan pada tingkat global, nasional, daerah, maupun kecamatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Kebumen sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 15
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

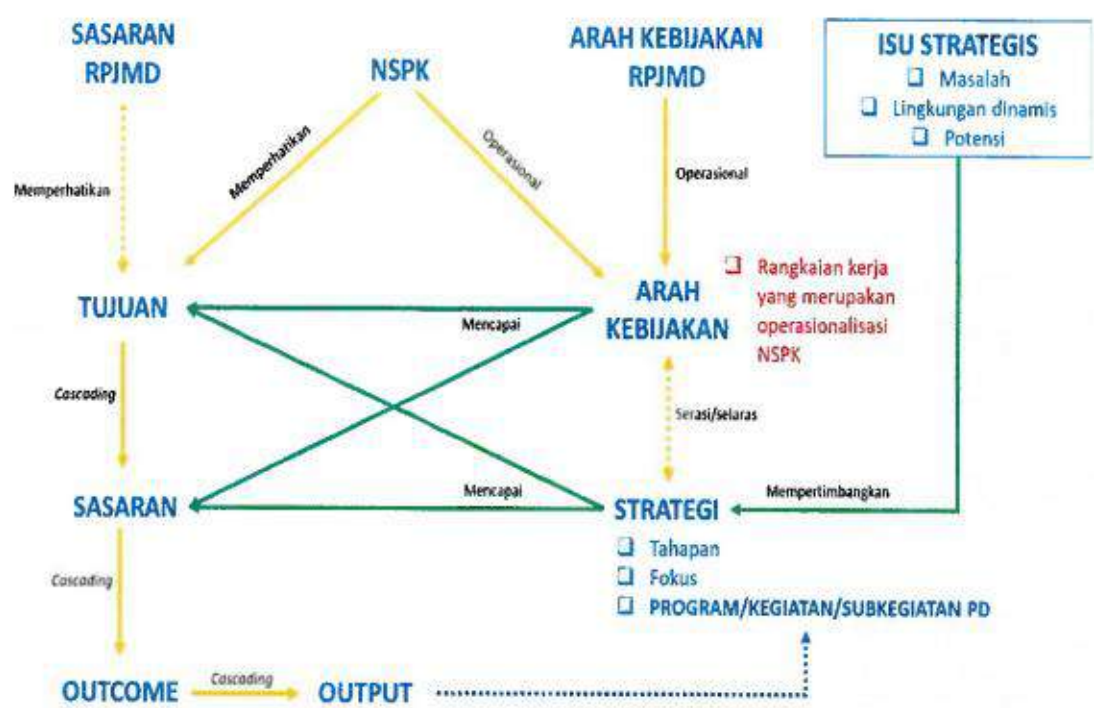
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah - Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	- Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan - Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah - Ancaman bencana banjir dan kekeringan - Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal	- Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal - Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perkembangan Teknologi Industri 5.0 - Dampak Perubahan Iklim Global	- Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah - Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional - Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat - Peningkatan tata kelola kecamatan - Pengembangan potensi wilayah - Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

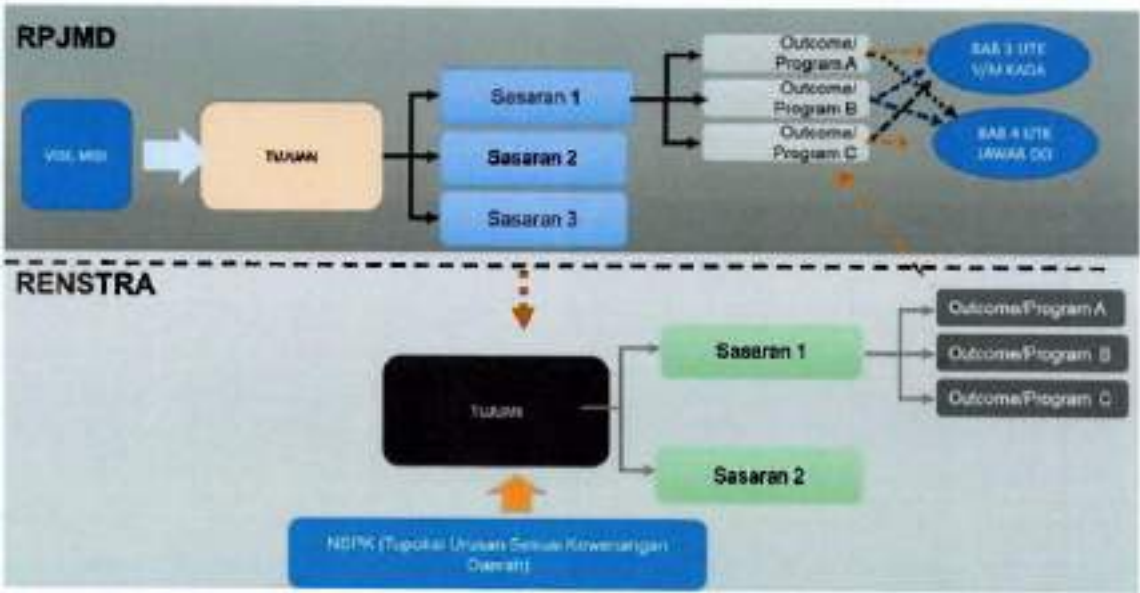
Kecamatan Kebumen dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi keharusan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Visi Bupati Kebumen tahun 2025-2029 adalah **"KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN – MAJU – SEJAHTERA – BERBUDAYA"**. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Kebumen adalah misi ke-4 yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi"**.



Gambar 3. 1
Konsep Rentsra Kecamatan Kebumen

Berdasarkan gambar 3.1, tujuan pembangunan daerah merupakan turunan dari sasaran RPJMD yang kemudian akan menjadi landasan perumusan tujuan Renstra PD untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan menggambarkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi Pembangunan.



Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Berdasarkan gambar 3.2, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja beserta targetnya. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Sasaran jangka menengah Kecamatan Kebumen adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebumen		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	92	92,2	92,5	92,7	92,9	93
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kebumen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari tahun 2025-2029 berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 92,2; target sasaran di tahun 2027 sebesar 92,5; target sasaran di tahun 2028 sebesar 92,7; target sasaran di tahun 2029 sebesar 92,9; target sasaran di tahun 2030 sebesar 93.

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang disusun secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), diperlukan strategi yang terarah. Strategi Kecamatan Kebumen selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Strategi perangkat daerah Kecamatan Kebumen disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa Penahapan Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) menunjukkan urutan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan waktu pelaksanaan dalam kurun waktu rencana strategis.

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan pada RPJMD menjadi dasar bagi kecamatan dalam merumuskan kebijakan operasional yang lebih spesifik sesuai dengan kewenangan dan karakteristik wilayah. Melalui kebijakan tersebut, Kecamatan Kebumen berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain itu, penguatan koordinasi antara kecamatan dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi langkah penting untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan. Keterkaitan arah kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan <i>stakeholder</i> untuk mendukung tata kelola kecamatan	

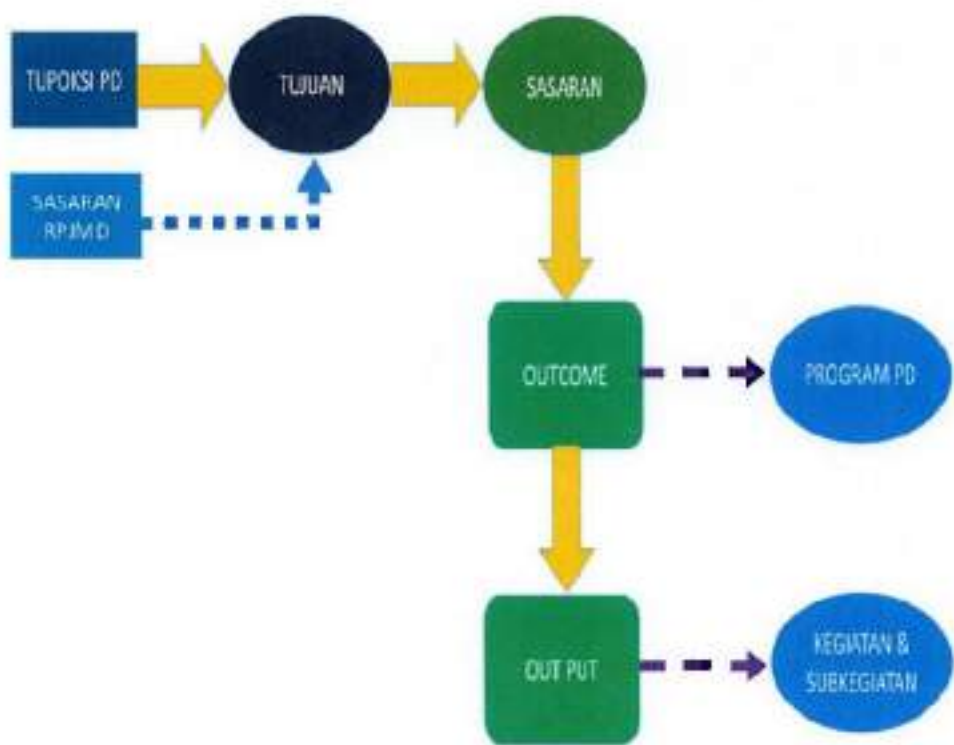
Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Kebumen. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah

Berikut uraian program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2025-2029 antara lain:

Tabel 4. 1

Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebumen

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Bahan/Material 10.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.Pengadaan Mebel 13.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	21.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
	Dilimpahkan kepada Camat	22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
8.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 25. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26. Evaluasi Kelurahan
D	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
E	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
10.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 29. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 31. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 32. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 34. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 35. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 4. 2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					12.456.448.266,00		11.647.251.560,00		11.927.516.475,00		12.325.505.173,00		12.577.836.210,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.867.360.909,00		8.101.293.650,00		8.308.304.739,00		8.667.406.546,00		8.876.170.260,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Nilai)	70,05	70,75	71,05	7.867.360.909,00	71,27	8.101.293.650,00	72,51	8.308.304.739,00	73,76	8.667.406.546,00	75,00	8.876.170.260,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan: Indeks)	92,00	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92,00	92,20		92,50		92,70		92,90		93,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00	26.000.000,00	100,00	26.000.000,00	100,00	26.000.000,00	100,00	26.000.000,00	100,00	26.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.376.837.357,00		3.316.207.910,00		3.404.411.736,00		3.441.798.627,00		3.484.365.950,00	
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Bumirejo) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00	4.376.837.357,00	100,00	3.316.207.910,00	100,00	3.404.411.736,00	100,00	3.441.798.627,00	100,00	3.484.365.950,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Selang) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan Tamanwinangun) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Panjer) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Indeks)	100,00	100,00	100,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.250.000,00		171.750.000,00		156.800.000,00		158.300.000,00		159.300.000,00	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Kebumen yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00	154.250.000,00	100,00	171.750.000,00	100,00	156.800.000,00	100,00	158.300.000,00	100,00	159.300.000,00	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 4. 3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen						
		Meningkatnya Kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan		Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan) (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Evaluasi Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Indeks)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kebumen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan Kebumen yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4. 4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				12.456.448.266		11.647.251.560		11.927.516.475		12.325.505.173		12.577.836.210		
7,01	KECAMATAN				12.456.448.266		11.647.251.560		11.927.516.475		12.325.505.173		12.577.836.210		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.867.360.909		8.101.293.650		8.308.304.739		8.667.406.546		8.876.170.260	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Nilai)	70,05	70,75	71,05		71,27		72,51		73,76		75		Camat Kebumen
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92	92,2		92,5		92,7		92,9		93		Camat Kebumen
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang (Dengan Satuan: Indeks)	92	92	92,2		92,5		92,7		92,9		93		Camat Kebumen
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun (Dengan Satuan: Indeks)	92	92	92,2		92,5		92,7		92,9		93		Camat Kebumen
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan: Indeks)	92	92	92,2		92,5		92,7		92,9		93		Camat Kebumen
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Indeks)	90,72	92	92,2		92,5		92,7		92,9		93		Camat Kebumen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					33.761.000		34.269.304		34.269.304		36.269.304		36.269.304	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	8	9	8		8		8		8		9		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah; (Dengan Satuan: Dokumen)													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	5	6	6		6		6		6		6		Lurah Panjer
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	6	5	5		5		5		5		5		Lurah Selang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Lurah Tamanwinangun
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Lurah Kebumen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	5	6	6		6		6		6		6		Lurah Bumirejo
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.710.000		20.710.000		20.710.000		22.210.000		22.210.000	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	5	6	5		5		5		5		6		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.051.000		13.559.304		13.559.304		14.059.304		14.059.304	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.647.555.174		6.844.906.386		7.097.019.144		7.361.448.183		7.551.890.500	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah; (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Panjer
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Selang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Tamanwinangun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Kebumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Bumirejo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.578.373.693		6.775.724.905		7.027.837.663		7.291.266.702		7.481.709.019	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	41	41	50		50		50		50		50		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					69.181.481		69.181.481		69.181.481		70.181.481		70.181.481	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.489.864		179.936.434		180.154.163		196.600.487		198.586.518	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Panjer
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Selang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Tamanwinangun
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Kebumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Bumirejo
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.927.200		16.700.000		16.700.000		17.718.629		17.796.458	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umum Dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					48.500.000		48.500.000		48.500.000		55.000.000		55.000.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					27.500.000		27.500.000		27.500.000		29.500.000		29.500.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					11.000.000		11.500.000		11.500.000		12.700.000		12.700.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan: Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					56.612.664		60.286.434		60.504.163		66.231.858		68.140.060	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan satuan: Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.950.000		6.450.000		6.450.000		6.450.000		6.450.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	6	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					162.016.950		180.837.600		170.000.000		202.000.000		207.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah;	4	51	14		15		48		6		6		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Urusan Pemerintah Daerah	(Dengan Satuan: Unit)													
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	26	26	26		25		5		5		5		Lurah Panjer
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	1	1	1		1		1		1		14		Lurah Selang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	39	39	3		20		20		20		20		Lurah Tamanwinangun
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	7	7	13		18		18		21		23		Lurah Kebumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	8	2	2		2		2		2		2		Lurah Bumirejo
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					14.000.000		29.000.000		45.000.000		30.000.000		32.000.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	45	45	10		10		45		0		0		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					90.900.000		105.837.600		90.000.000		117.000.000		114.000.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	4	3	3		2		2		4		4		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					57.116.950		46.000.000		35.000.000		55.000.000		61.000.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	2	2	1		2		0		3		2		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					618.895.320		634.447.684		592.908.920		618.186.153		631.688.438	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah; (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Panjer
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Selang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Tamanwinangun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Kebumen
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah Bumirejo
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	6	1	1		1		1		1		1		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					90.572.000		90.572.000		93.572.000		94.572.000		96.572.000	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum Dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)													
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					524.073.320		539.625.684		495.086.920		519.364.153		530.866.438	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.642.601		226.896.242		233.953.208		252.902.419		250.735.500	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah; (Dengan Satuan: Unit)	22	22	22		22		22		22		22		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	13	15	17		15		15		15		15		Lurah Panjer
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	25	25	25		25		25		25		25		Lurah Selang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	13	13	15		15		15		15		15		Lurah Tamanwinangun
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	20	20	20		20		20		20		20		Lurah Kebumen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Unit)	28	28	28		28		28		28		28		Lurah Bumirejo

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					71.681.601		71.576.242		71.633.208		75.582.419		75.915.500	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	11	11	11		11		11		11		11		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.951.000		32.310.000		32.310.000		32.310.000		32.810.000	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					130.010.000		123.010.000		130.010.000		145.010.000		142.010.000	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan: Laporan)	1	0	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.376.837.357		3.316.207.910		3.404.411.736		3.441.798.627		3.484.365.950	
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Tamanwinangun (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dan	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan: Persen)													
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.376.837.357		3.316.207.910		3.404.411.736		3.441.798.627		3.484.365.950	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Panjer (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Lurah Panjer
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Selang (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	24	24		24		24		24		24		Lurah Selang
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Lurah Tamanwinangun
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Lurah Kebumen
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Bumirejo (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Lurah Bumirejo

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					88.900.000		88.900.000		88.900.000		90.600.000		91.600.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan: Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	10		10		10		10		10		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.022.307.800		1.946.012.659		2.009.084.623		2.029.200.135		2.059.656.476	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan: Unit)	12	12	10		10		12		12		12		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.245.199.557		1.260.865.251		1.285.997.113		1.301.198.492		1.312.309.474	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan: Pokmas / Ormas)	10	10	10		10		10		10		10		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					20.430.000		20.430.000		20.430.000		20.800.000		20.800.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kebumen (Dengan Satuan: Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan: Orang)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.250.000		171.750.000		156.800.000		158.300.000		159.300.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Kebumen yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					154.250.000		171.750.000		156.800.000		158.300.000		159.300.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kebumen (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					29.500.000		29.500.000		29.500.000		29.500.000		29.500.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan: Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		17.500.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0		17		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		3.600.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		(Dengan Satuan: Dokumen)													
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					41.950.000		41.950.000		44.500.000		46.000.000		46.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan: Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					7.700.000		7.700.000		7.700.000		7.700.000		7.700.000	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial
TOTAL:					12.456.448.266		11.647.251.560		11.927.516.475		12.325.505.173		12.577.836.210		

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4. 5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Ayam, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029, 2025

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Indeks	92,00	92,20	92,50	92,70	92,90	93,00	
1.1.1	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kebumen	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Kebumen, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kebumen tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap dari 92,00 pada tahun 2025 menjadi 93,00 pada tahun 2030, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Kebumen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Indeks Tata Kelola Kecamatan ditetapkan secara konsisten pada angka 100,00 setiap tahunnya, yang menggambarkan tekad pemerintah kecamatan dalam mempertahankan kinerja tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Secara keseluruhan, target indikator kinerja utama tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kebumen memiliki arah strategis yang jelas dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan langkah strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. IKK digunakan sebagai tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dijelaskan bahwa pada periode perencanaan Renstra Tahun 2025–2029, Kecamatan Kebumen belum memiliki IKK yang ditetapkan secara spesifik. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya penetapan indikator kinerja utama dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan dan sistem pengukuran kinerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, Kecamatan Kebumen tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kebumen yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen, RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

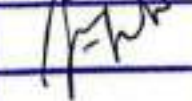
- 1. Kecamatan Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- 2. Kecamatan Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029;
- 3. Rencana strategis Kecamatan Kebumen merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
- 4. Kecamatan Kebumen berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029;
- 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
CAMAT KEBUMEN


KARYANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19680201 199403 1 009

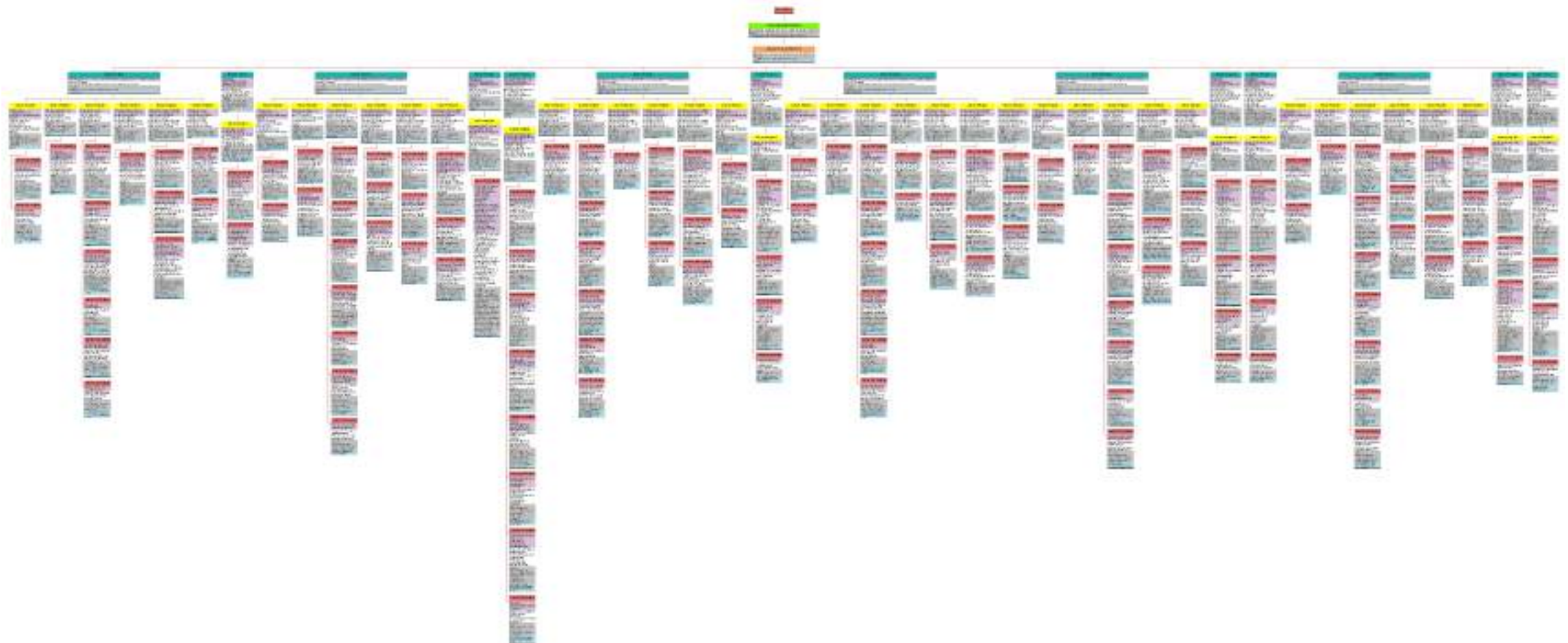
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Tan Khid	

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Kecamatan Kebumen



Lampiran 2 Cascading Kecamatan Kebumen



Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kebumen Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen

2025-12-10

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	HASIL/INDIKATOR 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
7	UNSUR KEMULAYAHAN				12.456.448.264		11.647.253.560		11.927.536.475		12.325.505.173		12.577.836.210			
7.01	KECAMATAN				12.456.448.264		11.647.253.560		11.927.536.475		12.325.505.173		12.577.836.210			
7.01.01	PROGRAM PEMBUNJANG URUSAN PERSEKUTUAN DASAR KABUPATEN/KOTA				7.387.940.890		6.881.285.850		6.888.504.719		6.987.096.508		6.876.178.388			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) (Dengan SasaranNilai)	70,85	74,75	71,05			71,27		72,51		73,76		75,00	CAMAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer (Dengan SasaranIndeks)	90,73	92	92,2			93,5		92,7		92,9		93	Camat Kebumen	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang (Dengan SasaranIndeks)	92	92	92,2			92,5		92,7		92,9		93	CAMAT KEBUMEN	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tawandawangan (Dengan SasaranIndeks)	92	92	92,2			92,5		92,7		92,9		93	CAMAT KEBUMEN	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen (Dengan SasaranIndeks)	92	92	92,2			92,5		92,7		92,9		93	CAMAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bawireja (Dengan SasaranIndeks)	90,73	92,00	92,20			92,50		92,78		92,90		93,30	CAMAT KEBUMEN	
7.01.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.761.090		32.285.354		33.265.504		34.265.890		34.265.890			
	Tersusunnya Dokumen Pembiayaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembiayaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan SasaranDokumen)	8	8	8			8		8		8		8	KASABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembiayaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun (Dengan SasaranDokumen)	5	6	6			6		6		6		6	LURAH	

KODE	BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	5		5		5		5		5		LURAH SELANG	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		LURAH TAMANWINANGUN	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		LURAH KEBUMEN	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	4		4		4		4		4		KASI PEMERINTAHAN, ESTETIS/ARTISAN, DAN KETERTIBAN	
7.01.01.2.61.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					23.718.000	20.718.000		20.710.000		22.232.000		22.230.000		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	5		5		5		5		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.01.2.61.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.651.000	13.558.304		13.559.304		14.659.304		14.659.304		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.01.2.62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.647.555.174	6.644.506.386		7.097.019.144		7.361.448.183		7.351.896.366			
	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		LURAH SELANG	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		LURAH TAMANWINANGUN	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		LURAH KEBUMEN	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH BUREKJO
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.576.372.693		6.775.726.985		7.027.837.643		7.261.296.792		7.481.799.029	KASBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	41	41	50			50		50		50		50	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemertanahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					69.181.481		69.181.481		69.181.481		70.181.481		70.181.481	KASBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Pemertanahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemertanahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12			12		12		12		12	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.409.564		179.936.434		189.154.163		196.690.487		205.586.539	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	KASBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH BLARE
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH TAMANWIBANGUN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH KEBUMEN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan SatuanBulan)	12	12	12			12		12		12		12	URAH BUREKJO
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.927.290		16.799.898		16.706.006		17.718.529		17.796.468	KASUBAG UMUM DAN KEPISMANAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Raket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan(Dengan Satuan:Raket)	1	1	1			1		1		1		1	KASUBAG UMUM DAN KEPISMANAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					68.990.090		68.990.090		68.990.090		68.990.090		68.990.090	KASUBAG UMUM DAN KEPISMANAN

KODE	NOMOR URUTAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	Tersedianya Bahan Logam Besi	Jumlah Paket Bahan Logam Besi yang Didistribusikan (Dengan Satuan Paket)	3	1	2			2		1		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					27.599.898		27.599.900		27.599.898		25.508.900		29.599.898		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didistribusikan (Dengan Satuan Paket)	3	2	3			2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perondong-sandangan					11.909.898		11.909.900		11.909.898		12.708.900		12.709.898		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
	Tersedianya Bahan Baku dan Perawatan Perondong-sandangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perondong-sandangan yang Didistribusikan (Dengan Satuan Dokumen)	10	10	10			10		10		10		10		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					66.632.644		66.294.434		66.584.143		66.233.858		68.149.898		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Didistribusikan (Dengan Satuan Paket)	3	3	3			3		3		3		3		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.2.06.0008	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8.899.898		8.899.900		8.899.898		8.899.900		8.899.898		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
	Tersedianya Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan Laporan)	10	10	10			10		10		10		10		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					9.899.898		9.899.900		9.899.898		9.899.900		9.899.898		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan Dokumen)	4	1	1			1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAH
7.01.91.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.851.998		186.851.900		170.880.898		182.880.900		207.889.898		
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan Unit)	4	51	54			15		45		6		6		KASUBAG PERENCANAAN DAN ETUANGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan Unit)	26	26	26			25		5		5		5		LUMAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan Unit)	1	1	1			1		1		1		14		LUMAH SELAIN

KODE	SIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUKSES/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	39	39	3		20		20		20		20		LURAH TAKRAWIYANGUR	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	7	7	13		18		18		21		23		LURAH KEBUMEN	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	8	2	2		2		2		2		2		LURAH BEMREJO	
3.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					14.000.000		29.000.000		45.000.000		39.000.000		32.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan/Unit)	40	40	10		10		40		0		0		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
3.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lempar					90.000.000		105.837.600		90.000.000		117.000.000		110.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
	Tersedianya Perakitan dan Mesin Lempar	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lempar yang Disediakan (Dengan Satuan/Unit)	4	3	3		2		2		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
3.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					57.116.900		66.000.000		35.000.000		55.000.000		81.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan/Unit)	0	3	1		0		0		0		1		KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAR	
3.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					618.905.220		624.447.664		592.900.029		619.186.153		621.600.439		
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	10	12	12		10		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEBANGKAWAN	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Lurah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	10	12	12		10		12		12		12		LURAH SELANG	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		LURAH TAKRAWIYANGUR	

KODE	SIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUKSES/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	12	12	12			12		12		12		12	LUMAH KEBUMEN	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Bulan)	12	12	12			12		12		12		12	LUMAH BUREJO	
1.01.91.2.05.0901	Penyediaan jasa Sateh Menyurat					4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Terlaksananya Penyediaan jasa Sateh Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Sateh Menyurat (Dengan Satuan Laporan)	8	1	1			1		1		1		1	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
1.01.91.2.05.0902	Penyediaan jasa Kamus/Keski, Sumber Daya Air dan Utdak					96.572.000		96.572.000		96.572.000		96.572.000		96.572.000	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAN	
	Terlaksananya jasa Kamus/Keski, Sumber Daya Air dan Utdak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kamus/Keski, Sumber Daya Air dan Utdak yang Diadikatkan (Dengan Satuan Laporan)	12	12	12			12		12		12		12	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAN	
1.01.91.2.05.0904	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					524.073.320		524.073.320		495.090.320		529.364.153		520.896.439	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAN	
	Terlaksananya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadikatkan (Dengan Satuan Laporan)	1	1	12			12		12		12		12	KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAN	
1.01.91.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					282.802.901		226.896.142		226.896.204		282.802.419		290.758.902		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan/Unit)	22	22	22			22		22		22		22	KASBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	13	15	17			15		15		15		15	LUMAH	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	25	25	25			25		25		25		25	LUMAH SELANG	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	13	13	15			15		15		15		15	LUMAH TAMANWIRANCUR	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASIS/UMUR 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Sarang MIS Daerah Pemusjng Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarang Pemeliharaan Sarang MIS Daerah Pemusjng Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	20	20	20		20		20		20		20		LURAH KESUMEN
	Pemeliharaan Sarang MIS Daerah Pemusjng Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarang Pemeliharaan Sarang MIS Daerah Pemusjng Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/Unit)	20	20	20		20		20		20		20		LURAH KUMUNDU
7.81.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					71.681.600		71.576.342		71.633.288		75.582.410		75.925.500	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya (Dengan Satuan/Unit)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.81.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					83.891.000		82.910.888		82.910.888		82.910.888		82.910.888	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki (Dengan Satuan/Unit)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.81.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					139.010.000		123.000.888		139.810.888		140.810.888		142.810.888	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Dengan Satuan/Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.81.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
	Tersedianya Penempatan Pengadaan Masyarakat	Penempatan Penempatan Pengadaan Masyarakat Kecamatan (Estimasi Kabupaten) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.81.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
	Tersedianya Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan/Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOSIALISERAN
7.81.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Ronggong					26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	DIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASIS/UM 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
III	IV	V	VI	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
	Terlaksananya Urutan Pemerintahan yang Terkait dengan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencan/kerja pada Urutan Pemerintahan (Dengan Satuan Laporan)	4	4	4			4		4		4		4		KASBERG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Ditanggung					0		0		0		0		0		-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Ditanggung (Dengan Satuan Laporan)														-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Ditanggung (Dengan Satuan Laporan)	1	0	0			0		0		0		0		KASI PELAYANAN (URUS DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBUMAHAN					4.376.827.337		3.316.207.910		3.495.411.736		3.491.799.627		3.494.365.950		
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Panjer) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100			100		100		100		100		CAMAT KEBUMEN
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan (Kelurahan Selang) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100			100		100		100		100		CAMAT KEBUMEN
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan (Kelurahan Tamorejan/agus) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100			100		100		100		100		CAMAT KEBUMEN
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan (Kelurahan Kebumen) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100			100		100		100		100		CAMAT KEBUMEN
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan (Kelurahan Bumiayu) (Dengan Satuan/Person)	100	100	100			100		100		100		100		CAMAT KEBUMEN
7.01.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.376.827.337		3.316.207.910		3.495.411.736		3.491.799.627		3.494.365.950		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dua Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Panjer (Dengan Satuan/Kegiatan)	4	4	4			4		4		4		4		Lurah

KODE	DIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PACU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		
				TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kelurahan Selang (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	34	34		34		34		34		34	LERAH SELANG
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kelurahan Tamenanrajan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4	LURAH TAMANWINARJAN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kelurahan Kebumen (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4	LERAH KEBUMEN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kelurahan Buntoro (Dengan Satuan:Kegiatan)	Jumlah Output: 2024	4	4		4		4		4		4	LERAH BUNTORO
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan					88.800.000		88.800.000		88.800.000		88.800.000		Kepala Seksi Pemantauan Masyarakat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Masyarakat)	10	10	10		10		10		10		10	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.022.307.800		3.946.612.450		2.009.004.613		2.029.100.135		Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
	Terbangnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.345.399.557		1.360.865.251		1.385.907.113		1.361.158.402		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Tertindaknya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Petrus dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Petrus / Ormas)	10	10	10		10		10		10		10	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					20.439.000		20.439.000		20.439.000		20.400.000		Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
	Tertindaknya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03	PROGRAM PENTELUSUGAAN URUSAN PEMERINTAHAN URUM					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000

KODE	DIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUKSESGATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
CD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
	Meningkatnya Konduktivitas Kecamatan	Indeks Konduktivitas Kecamatan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT	
7.01.05.2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Desa					17.900.000		12.000.000		12.000.000		17.900.000		12.000.000		
	Terwujudnya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa Kecamatan Kebumen (Dengan Satuan Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETERTERANGAN DAN KETERTIBAN	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cetakbiru Nasional dalam rangka Menantisipasi Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Sila-sila Pancasila serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					17.900.000		12.000.000		12.000.000		17.900.000		12.000.000	KASI KETERTERANGAN DAN KETERTIBAN	
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cetakbiru Nasional dalam rangka Menantisipasi Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Sila-sila Pancasila serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cetakbiru Nasional dalam rangka Menantisipasi Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Sila-sila Pancasila serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.250.000		171.750.000		154.800.000		154.300.000		159.300.000		
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APSDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Kebumen yang melaksanakan APSDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen) (Dengan Satuan Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					154.250.000		171.750.000		154.800.000		154.300.000		159.300.000		
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kebumen (Dengan Satuan Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Aneka Desa					29.500.000		28.500.000		29.500.000		29.500.000		29.500.000	KASI TATA PEMERINTAHAN	

KODE	DIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	
	Tertelusarnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan Dokumen)	4	4	4			4		4		4		4		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.03.06.2.03.0008	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa					0	17.500.000		0		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Tertelusarnya Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa (Dengan Satuan Dokumen)	0		0			27		0		3		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.03.06.2.03.0009	Sekunderisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.600.000	2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terdidanya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan Dokumen)	1	1	1			1		1		1		1		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.03.06.2.03.0008	Fasilitas Sistemisasi Pemeliharaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					4.900.000	4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000	KASI PERBERGAYAH MASYARAKAT
	Tertelusarnya Fasilitas Sistemisasi Pemeliharaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sistemisasi Pemeliharaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan Dokumen)	1		1			1		1		1		1		KASI PERBERGAYAH MASYARAKAT
7.03.06.2.03.0013	Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum					8.000.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	KASI KETERANGAN DAN KETERTIBAN
	Tertelusarnya Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan Dokumen)	1	1	1			1		1		1		1		KASI KETERANGAN DAN KETERTIBAN
7.03.06.2.03.0018	Fasilitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					41.900.000	41.900.000		41.900.000		41.900.000		41.900.000		41.900.000	KASI PERBERGAYAH MASYARAKAT
	Tertelusarnya Fasilitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan Dokumen)	2	2	2			2		2		2		2		KASI PERBERGAYAH MASYARAKAT
7.03.06.2.03.0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					60.000.000	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Tertelusarnya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan Dokumen)	6	6	6			6		6		6		6		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PADU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.2.61.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					7.789.000		7.789.000		7.700.000		7.500.000		7.789.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KEBERKANTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	(jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Saluran Laporan))	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELAYANAN UMUM DAN KEBERKANTERAAN SOSIAL
			TOTAL:		12.455.448.198		11.647.251.500		11.927.516.475		12.325.585.173		12.577.836.110		

Lampiran 4 Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp. (0287) 381768
Laman : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id>
Pos-el : kecamatankebumen0@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR: 700/1109/TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Kebumen,

Karyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
NOMOR 700/1109/TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBUMEN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebumen		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25-100	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan

				menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Kebumen	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodic triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kebumen	Formulasi Pengukuran: $\frac{((\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi} + \text{Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes} + \text{Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan})/3) \times 100}{\text{Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi} = \frac{(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun})}{\text{dikali } 100 \%}$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{(\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan})}{\text{dikali } 100\%}$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{(\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan})}{\text{dikali } 100\%}$ Sumber Data: Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
-------	--	--	---	--------------------------------------	--	--

					Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab : Camat Kebumen	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen)	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Kebumen	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kebumen) adalah skor hasil evaluasi atas tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat kecamatan yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Kebumen)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data: Kecamatan Kebumen	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Kebumen) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan kecamatan dalam menindaklanjuti dan

					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Kebumen	menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas (Kecamatan Kebumen)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data: Kecamatan Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Kebumen	Indeks Kondusivitas (Kecamatan Kebumen) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di wilayah kecamatan, yang mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, stabil, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Kebumen)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data: Kecamatan Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Kebumen	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa-desa di wilayah kecamatan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

						berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.
1.1.1.5			Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Formulasi Pengukuran; (Jumlah masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelurahan / Jumlah masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diundang) × 100% Sumber data: Kecamatan Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Kebumen	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah persentase keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang hadir dan/atau berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan dibandingkan dengan jumlah masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang diundang pada periode pengukuran tertentu.

Kebumen, 15 September 2025
Camat Kebumen,



Karyanto

Lampiran 5 SK Tim Penyusunan Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp. (0287) 381768
Laman : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id>
Pos-el : kecamatankebumen0@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 700/1110 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebumen Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

- Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2045; dan
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ; b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan |

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Kebumen Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Camat Kebumen Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 15 September 2025


SURYANTO, S.H., M.M.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700/1110 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kebumen	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen	Sekretaris	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kebumen	Anggota	
8.	Ketua Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kebumen	Anggota	
9.	2 (dua) orang Staf pada Kecamatan Kebumen	Anggota	1. Ratna Wahyu Anggraeni, A.Md.Ak. 2. Restu Mahani, S.Ak.

CAMAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN



RYANTO, S.H., M.M.

LAMPIRAN II
CAMAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700/1110 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen	Ketua	
2.	2 (dua) orang Staf Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen	Anggota	1. Ratna Wahyu Anggraeni, Amd.Ak. 2. Restu Mahani, S.Ak.

CAMAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN



KARYANTO, S.H., M.M.

